



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKJIP)
2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan perkenannya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan memberi gambaran tentang kinerja Instansi dalam kurun 1 (satu) tahun dengan dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Umum (DAU). Disamping itu untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi tumpuan dari semua kinerja pada tahun 2025 sehingga terwujudnya Bolaang Mongondow yang Baru, Berbudaya, Berdaya Saing dan Mandiri Sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur serta mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri bertumpu pada potensi suberdaya lokal sebagaimana visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini ada yang masih kurang untuk itu masukan yang bersifat konstruktif menjadi harapan untuk perbaikan dimasa yang akan datang, semoga tuhan yang maha esa menyertai seluruh pengabdian kita kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow

Lolak, Januari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


FYFTANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si
NIP. 19731211 199803 2 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Gambaran umum Dinas PMPTSP Kab. Bolaang Mongondow	1
B. Aspek Strategis Organisasi	4
C. Permasalahan Utama berdasarkan tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	10
C. Indikator Kinerja Utama	11
D. Rencana Kinerja Tahunan	12
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	25
C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	29
 BAB IV PENUTUP	 35
A. Kesimpulan atas Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Saran tindak Lanjut	36

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil	2
1.2 Daftar Tenaga Honorer Non Kategori II	4
2.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas PMPTSP	10
2.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas PMPTSP	10
2.3 Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2025	11
2.4 Indikator Kinerja Utama	12
2.5 Rencana Kinerja Tahunan	12
3.1 Perbandingan Target dan Capaian Realisasai Tahun 2025.....	17
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja IKM Tahun sebelumnya	18
3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Indesk Kepuasan Masyarakat 5 Tahun sebelumnya	19
3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra	21
3.5 Efesiensi Penggunaan Sumber Saya	24
3.6 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025	26
3.7 Realisasi Anggaran Program / Kegiatan	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi DPMPTSP	2
Gambar 3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara	22



DAFTAR GAMBAR

Grafik 1 Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025..	17
Grafik 2 Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	19
Grafik 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya IKM 5 Tahun Terakhir ...	20
Grafik 4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dan target Akhir Renstra	21



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A. Perjanjian Kinerja Revisi 2025
- Lampiran B. Perjanjian Kinerja 2026
- Lampiran C. Cascading
- Lampiran D. Rencana Aksi 2025 dan Rencana Aksi 2026
- Lampiran E. Tabel Keselarasan Dinas PMPTSP 2025
- Lampiran F. Pohon Kinerja
- Lampiran G. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025 dan 2026
- Lampiran H. Pengukuran Kinerja Kegiatan 2025
- Lampiran I. SK Penetapan IKU Tahun 2025
- Lampiran J. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 2025
- Lampiran K. SOP Penyusunan LAKIP



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BOLAANG MONGONDOW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Tipe A yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut :

Kepala Dinas

Sekretaris

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Fungsional Perencana

Fungsional Penata Perizinan

Fungsional Penata Penanaman Modal

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

Gambar 1

Struktur Organisasi DPMPTSP

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 27 Orang
2. Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak : 4 orang

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Negeri Sipil

NO.	Nama	NIP	Gol./Ruang	Jabatan
1	Fyfiannie Ismayanty, SE, M.Si	19731211 199803 2 005	Pembina Utama Muda IV c	Kepala Dinas
2	Ni Wayan Miniastuti, ST	19750821 200501 2 009	Pembina Tkt. I IV b	Sekretaris
3	Riadi A. Faisal mamonto, S.Hut	19770908 200212 1 007	Pembina, IV/ a	Kabid Perencanaan
4	Han Potabuga, SAP.ME	19780129 199702 1 001	Pembina IV/ a	Kabid PTSP
5	Indawati Mokoginta, SP	19800306 200902 2 003	Pembina IV/ a	Kabid Pengendalian, Data dan Sistem Informasi
6	Sudirman Hasse, S.Kom	19800914 200501 1 009	Penata Tkt. I, III/d	Penata Muda Perizinan
7	Farijudin Abas, S.Kom	19821217 201001 1005	Penata Tkt. I, III/d	Penata Muda Perizinan
8	Marlin Mucthar	19710511 199503 2 002	Penata Tkt. I, III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	Try Indasari , SAB	19840213 201001 2 005	Penata Tkt. I, III/d	Penata Muda Penanaman Modal
10	Mukhtar Korompot, SE	19700815 200701 1 030	Penata Tkt. I, III/d	Penata Muda Penanaman Modal
11	Roby Simanon	19820122 201410	Penata Muda,	Perencana



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

		1 001	Tkt. I III/b	
12	Suharto Mokodongan, SE	19690411 200104 1 001	Penata, III/c	Pelaksana
13	Etty Kolintama	19681125 199402 2 001	Penata Muda, Tkt. I III/b	Pelaksana
14	Djemi Lapian,S.Sos	19700824 201410 1 001	Penata, III/c	Pelaksana
15	Helma Paputungan, SH	19830302 201001 2 005	Penata Muda, Tkt. I III/b	Penata Pertama Perizinan
16	Renata Nabilla Safitrie, S.M	19980509 202505 2 003	Penata Muda/IIIa	Pelaksana
17	Arief Dwi Tiancahyo, SE	19920903 202505 1 002	Penata Muda/IIIa	Pelaksana
18	Gissela Dewi Triana Nasution, SH	19991102 202505 2 002	Penata Muda/IIIa	Pelaksana
19	Heldaningsi Makalalag, SE	19970705 202505 2 006	Penata Muda/IIIa	Pelaksana
20	Fitra Pratama Daumpung	19910619 202505 1 002	Penata Muda/IIIa	Pelaksana
21	Awaludin Siking, S.Kom	19980423 202505 1 004	Penata Muda/IIIa	Pelaksana
22	Jerry Hoke, SE	19970619 202505 1 001	Penata Muda/IIIa	Pelaksana
23	Prilly P. Mokoginta, SE	19960602 202505 2 002	Penata Muda/IIIa	Pelaksana
24	Meyske T. Daleno	19710521 201410 2 001	Pengatur, II/c	Pelaksana
25	Oslan W. Mokodompit	19720309 201410 1 001	Pengatur, II/c	Pelaksana
26	Indrawati Potabuga,SE	198201202007012 005	Penata Muda Tkt. I III /b	Penata Pertama Perizinan
27	Samsudin Kolopita	19790608 200906 1 001	Pengatur, II/c	Staf Petugas Petugas Service Point
28	Vika B. Hapulu	19810220 202521 2 002	Golongan V	Pelaksana
29	Fitri Yani Korompot	19800725 202521 2 003	Golongan V	Pelaksana
30	Toni Potabuga	19741005 202521 1 002	Golongan V	Pelaksana
31	Jemri Damopolii	19860102 202521 1 004	Golongan V	Pelaksana



Tabel 1.2

Daftar Tenaga Honorer Non Kategori II

No.	Nama	Jabatan
1	Sahrul Paputungan	Cleaning Service
2	Felmi Aling	Cleaning Service
3	Sunandri Bonde	Penjaga Kantor
4		Sopir

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow sangat penting keberadaannya untuk masyarakat, hal ini disebabkan karena Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow urusan Penanaman Modal.

Lingkungan Strategik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

a. Geografis

Kabupaten Bolaang Mongondow terletak di jasad pulau Sulawesi bagian utara tepat pada posisi 123° - 124° BT dan 0° 30' - 1° 0' LU. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan, sebelah Utara berbatasan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Topografi daerah sebagian besar berupa gunung – gunung dan pegunungan dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 – 2000 meter diatas permukaan air laut. Iklim umumnya tropis dengan curah hujan yang



cukup tinggi antara 2000 – 3000 mm/thn.

Sarana transportasi jalan raya antara Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Propinsi melalui jalan darat dan tergolong sangat lancar. Demikian juga halnya Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan – kecamatan juga melalui jalan darat dan tergolong lancar.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow sepanjang tahun meningkat dengan laju pertumbuhan yang lambat. Pertumbuhan kependudukan ini ditandai pula dengan perubahan struktur umur penduduk dimana terjadi pergeseran dari struktur umur muda menjadi struktur umur penduduk tua.

Jumlah penduduk yang semakin padat merupakan faktor yang sangat menentukan upaya pelestarian lingkungan didaerah. Kecuali itu berbagai perubahan yang terjadi pada karakteristik demografi sebagai pengaruh keberhasilan pembangunan pendidikan dan sosial ekonomi akan membuka peluang bagi terselenggaranya pelayanan lingkungan yang lebih efektif, efisien dan bermutu. Namun disisi lain, melihat tingkat pendidikan dan pendapatan penduduk yang masih relatif rendah, serta penyebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah, maka dapat menjadi hambatan dalam pembangunan perlindungan lingkungan.

c. Sosial Politik

Perubahan peta politik Nasional telah membawa dampak terbukanya kran Demokrasi dan kebebasan bagi rakyat. Berkembangnya tuntutan dinamika dan aspirasi masyarakat saat ini adalah merupakan pemicu untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah sesuai dengan asas Pemerintahan yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya dan dapat semudah mungkin dijangkau masyarakat.

Perubahan lingkungan seperti diuraikan diatas, menuntut



manajemen organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow mengubah logika yang dipakai sebagai dasar menjalankan roda organisasinya. Pengetahuan manajemen berkembang melalui proses pergeseran paradigma yaitu manajemen tradisional, bergeser kepada paradigma baru sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

d. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, sebarang tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat). Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau



permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

C. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghadapi beberapa permasalahan yang merupakan isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Peluang investasi yang ada belum bisa di konversi menjadi investasi sektor riil secara optimal karena terkendala tata ruang dan lingkungan.
2. Aplikasi perizinan yang digunakan adalah aplikasi yang berlaku secara nasional yang dikendalikan oleh kementerian, sehingga apabila terjadi kendala pada penggunaan aplikasi hanya bisa melapor ke helpdesk aplikasi, tetapi untuk mendapat tanggapan atas kendala yang dihadapi dari help desk sangat lama.
3. Kurangnya pegawai sebagai petugas pelayanan pada service point perizinan usaha yang ada di Kecamatan Dumoga Utara dan Kecamatan Dumoga menyebabkan terhambatnya pelayanan.
4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
5. Belum optimalnya ketersediaan Sumber Daya yang dibutuhkan dalam usaha penanaman modal.
6. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat yang harus diikuti dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

perubahan peraturan daerah dimana proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) membutuhkan waktu yang panjang, sehingga beberapa layanan tidak dapat diberikan karena harus menunggu penetapan Peraturan Daerah.

7. Belum optimalnya pelaksanaan promosi potensi daerah secara terpadu karena terkendala anggaran yang tidak mencukupi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow

VISI

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow, maka visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 adalah :

“Bolaang Mongondow yang Baru, Berbudaya, Berdaya Saing dan mandiri sebagai lumbung pangan Indonesia Timur”

MISI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai tugas dan fungsinya mendukung dua misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu :

“Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Bertumpu pada Potensi Sumberdaya Lokal”

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Untuk mendukung visi misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bolaang Mongondow menetapkan :

Tujuan

Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif

Sasaran

1. Meningkatnya Pelayanan Publik



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

Tabel 2.1
Tujuan Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke.				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	5%	5%	5%	5%	5%

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke.				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan (Angka)	95	95	95	95	90

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Program pendukung	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	Program Pelayanan Penanaman Modal	122.803.041
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	208.872.250
				Program Promosi Penanaman Modal	34.710.232
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	24.022.389

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total Unsor yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang 25}$	95

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra). RKT TA. 2025 ini juga merupakan gambaran kegiatan dan output Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

1. Pengukuran Kinerja

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).



b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) .

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

> 85 = Sangat berhasil

$70 < X \leq 85$ = Berhasil

$55 < X \leq 70$ = Cukup Berhasil

≤ 55 = Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**".

Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{Nilai Mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$



Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil :	92,5
Berhasil :	77,5
Cukup Berhasil :	62,5
Tidak Berhasil :	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

2. Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran

Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja sasaran adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Pengukuran tingkat capaian “Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan” dengan indikator sasaran “Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan formula sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \times 25$$

$$IKM = \frac{0}{0} \times 0,11 \times 25$$

$$IKM = 0$$

$$IKM = 0$$

(Perhitungan Data Realisasi Investasi Daerah Lampiran II)

Hasil capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Indeks Kepuasan



Masyarakat terhadap pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun ini

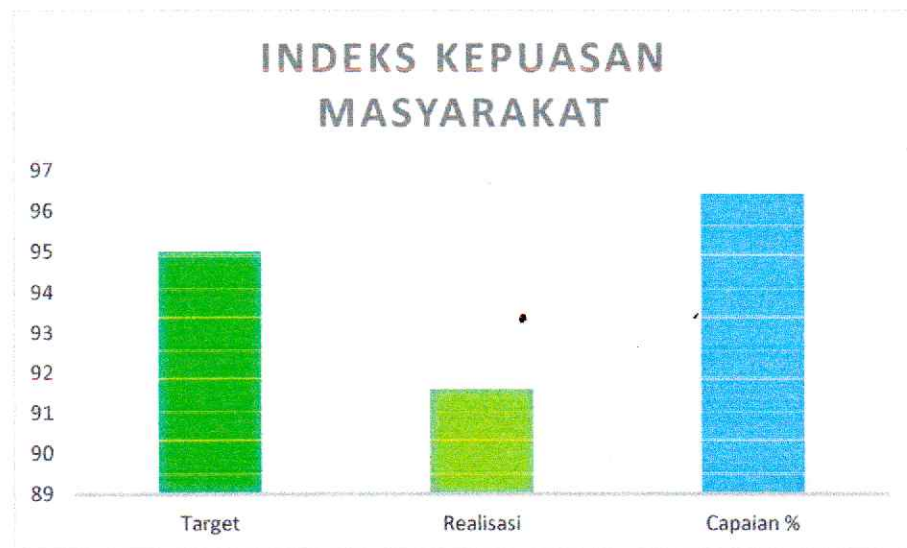
Tabel. 3.1

Perbandingan target dan Capaian Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks kepuasan masyarakat	90	91,95	96.41

Berdasarkan tabel 3.1 diatas bahwa Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Realisasi Hasil Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 menurun sedikit.

Grafik 1. Perbandingan target dan Capaian Indeks Kepuasan masyarakat Tahun 2025





2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Tahun Ini dengan Tahun lalu

Perbandingan Hasil Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya indeks kepuasan masyarakat tahun sebelumnya dan capaian tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja IKM Tahun Sebelumnya

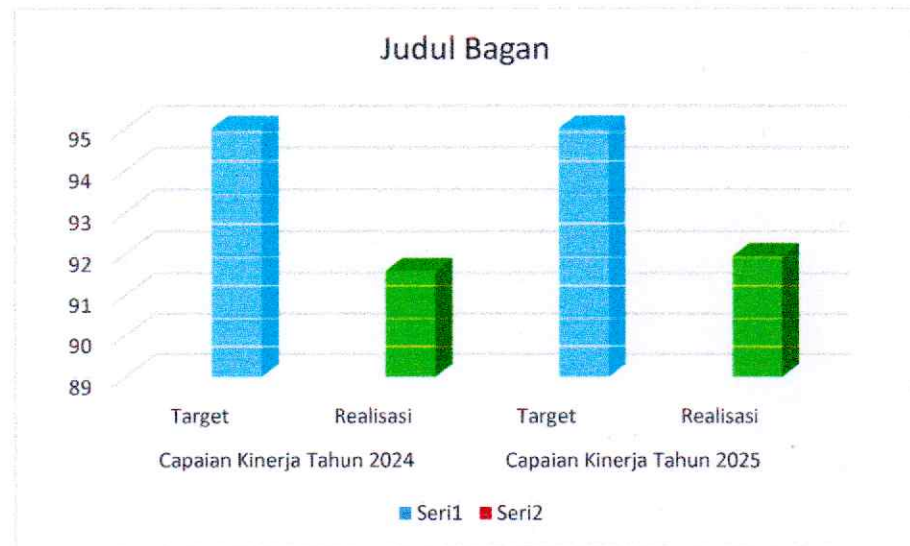
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat	95	91.59	95	91.95

Berdasarkan tabel 3.2 diatas bahwa Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan Hasil Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 meningkat dengan target yang sama dengan tahun 2024 dan meningkat sedikit dimana pencapaian tahun 2024 91.59 dengan target 95 sedangkan dan tahun 2025 pencapaian 91,95 tapi dengan target 95.

Grafik 2. Perbandingan target dan Capaian Indeks Kepuasan masyarakat Tahun 2025 dengan tahun Sebelumnya



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025



Grafik diatas menunjukkan bahwa Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan Hasil Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 meningkat namun dengan target pencapaian yang sama dengan tahun 2025 dan meningkat sedikit dimana pencapaian tahun 2024 91,59 dengan target 95 sedangkan dan tahun 2025 pecapaian 91,95 tapi dengan target 95. Dan untuk pengukuran kinerja masuk pada kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat 5 tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	
						Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,60	91,56	90,57	92,58	91,59	95	91,95

Berdasarkan tabel 3.3 diatas bahwa Indikator Kinerja Sasaran “Persentase meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dengan target sebesar 95 dan realisasi angka indeks kepuasan masyarakat 91,95 dari



tahun – tahun sebelumnya target angka Indeks Kepuasan Masyarakat 95, Berdasarkan perhitungan data IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ada dengan Total Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total unsur Dan skala ordinal pada pengukuran rata-rata tahun sebelumnya.

Grafik 3. Capaian Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya IKM 5 Tahun Terakhir



Grafik 3 diatas bahwa Indikator Kinerja Sasaran “Persentase meningkatnya indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 dengan target sebesar 95 dan realisasi angka indeks kepuasan masyarakat 91,95 dari tahun – tahun sebelumnya target angka Indeks Kepuasan Masyarakat 95, Berdasarkan perhitungan data IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ada dengan Total Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total unsur Dan skala ordinal pada pengukuran rata-rata tahun sebelumnya dapat di nilai **Sangat Berhasil**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Target Jangka Menengah dengan Target Akhir Renstra



Perbandingan Hasil Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 dan capaian tahun akhir Renstra dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dan target Akhir renstra

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025		Capaian Kinerja Akhir Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat	95	91.95	95	95

Berdasarkan tabel 3.4 diatas bahwa Indikator Kinerja Sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target Tahun 2025 sebesar 95 dan realisasi angka indeks kepuasan masyarakat 91.95 dari Target Akhir Renstra Target Indeks Kepuasan Masyarakat 95 dan Realisasi 95.

Grafik 4. Capaian Indikator Kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dan target Akhir Renstra





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

Grafik 4 diatas bahwa Indikator Kinerja Sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target Tahun 2025 sebesar 95 dan realisasi angka indeks kepuasan masyarakat 91,95 dari Target Akhir Renstra Target Indeks Kepuasan Masyarakat 95 dan Realisasi 92,58.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Provinsi

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan total responden 44 Responden dengan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan sampai dengan triwulan IV tahun 2025 adalah 93.00, dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025





Berdasarkan tabel dan Grafik diatas bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2020 – 2025) sampai dengan tahun 2025 terjadi fluktuasi naik turun nilai indeks kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey. Berdasarkan dokumen hasil survey kepuasan masyarakat ada beberapa komponen/unsur yang mempengaruhi nilai indeks kepuasan masyarakat yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

A. Keberhasilan

Keberhasilan dalam peningkatan indeks Kepuasan Masyarakat karena dengan adanya beberapa faktor antara lain :

- Adanya Penambahan Pelayanan Tingkat Kecamatan (Service Point)
- Adanya kerjasama antara dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan BPJS Ketenaga Kerjaan
- Adanya kerjasama antara dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Dirjen Pajak

B. Kegagalan

Kegagalan dalam peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat karena adanya beberapa faktor/kondisi yang mempengaruhi antara lain :



- Jaringan internet yang sering mengalami gangguan sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian proses perizinan
- Pengembangan aplikasi perizinan oleh pemerintah pusat sehingga aplikasi tidak dapat digunakan untuk beberapa waktu.
- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang harus diikuti oleh perubahan regulasi di daerah, sehingga mempengaruhi persyaratan dan prosedur perizinan.
- Tidak ada lagi Bantuan Dana Non Fisik
- Kurangnya diklat/ pelatihan kepada petugas pelayanan karena terbatasnya anggaran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya		
	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	96,41	92,32	4,09

7. Analisis Program yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun yang Mendukung Keberhasilan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dengan Anggaran sebesar : Rp. 24.022.389,-
2. Program Promosi Penanaman Modal dengan Anggaran sebesar Rp.



34.710.232,-

3. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar :
Rp. 122.803.041,- : dan
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan
Anggaran sebesar Rp. 207.872.449,-. :

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang dalam DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Pendapatan dari DPPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 500.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 236.913.000,- atau 47.38% sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 4.487.606.418,- dan terjadi perubahan anggaran menjadi 3.933.202.174 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 3.631.186.061 atau 92.32%. Anggaran belanja Belanja Daerah antara lain Belanja Operasional pada tahun 2025, Belanja Pegawai adalah sebesar Rp. 3.070.745.377 dengan realisasi sebesar Rp. 2.892.324.209 atau 94.19%, Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 778.996.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 658.678.352,- atau 93,91 %. Serta Belanja Modal pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 83.459.996 dengan realisasi sebesar Rp. 80.185.500 atau 96.07 %. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

Tabel 3.6

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
4	PENDAPATAN -LRA	500.000.000,00	236.942.100,00	47.39	680.095.915,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000,00	236.942.100,00	47.39	680.095.915,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	500.000.000,00	236.942.100,00	47.39	680.095.915,00
5	BELANJA DAERAH	3.933.202.174,05	3.631.186.061,00	92.32	3.788.855.836,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.849.742.177,59	3.551.002.561,00	92.24	3.788.855.836,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.070.745.377,00	2.892.324.209,00	94.19	2.710.669.194,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	778.996.800,59	658.678.352,00	84.55	1.078.186.642,00
5.2	BELANJA MODAL	83.459.996,46	80.183.500,00	96.07	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.459.996,46	80.183.500,00	96.07	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.433.202.174,05)	(3.394.243.961,00)	98.87	3.108.759.921,00

2. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Capaian kinerja realisasi anggaran program / kegiatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

NO	Uraian	ANGGARAN	REALISASI		
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Realisasi %	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3,933,202,174.05	3,631,186,061.00	92.32%	302,016,113.05
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,660,650,312.45	3,388,601,342.00	92.57%	272,048,970.45
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,117,342,153.00	2,936,350,927.00	94.19%	180,991,226.00
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,058,745,377.00	2,883,924,209.00	94.28%	174,821,168.00
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	38,640,000.00	35,040,000.00	90.68%	3,600,000.00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19,956,776.00	17,386,718.00	87.12%	2,570,058.00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76,052,561.00	63,765,095.00	83.84%	12,287,466.00
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51,615,000.00	49,675,954.00	96.24%	1,939,046.00
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24,437,561.00	14,089,141.00	57.65%	10,348,420.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79,437,115.00	75,439,700.00	94.97%	3,997,415.00
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79,437,115.00	75,439,700.00	94.97%	3,997,415.00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83,459,996.46	80,183,500.00	96.07%	3,276,496.46
-	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	83,459,996.46	80,183,500.00	96.07%	3,276,496.46
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173,513,760.00	128,525,533.00	74.07%	44,988,227.00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,513,760.00	39,525,533.00	88.79%	4,988,227.00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129,000,000.00	89,000,000.00	68.99%	40,000,000.00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130,844,726.99	104,336,587.00	79.74%	26,508,139.99
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125,844,726.99	99,336,587.00	78.94%	26,508,139.99
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	-
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	16,024,814.00	15,757,820.00	98.33%	266,994.00
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16,024,814.00	15,757,820.00	98.33%	266,994.00
-	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	16,024,814.00	15,757,820.00	98.33%	266,994.00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	13,233,327.60	12,673,366.00	95.77%	559,961.60
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13,233,327.60	12,673,366.00	95.77%	559,961.60
-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	13,233,327.60	12,673,366.00	95.77%	559,961.60
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	125,815,432.00	109,543,882.00	87.07%	16,271,550.00
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	125,815,432.00	109,543,882.00	87.07%	16,271,550.00
-	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25,815,432.00	21,798,382.00	84.44%	4,017,050.00
-	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	100,000,000.00	87,745,500.00	87.75%	12,254,500.00
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	117,478,288.00	104,609,651.00	89.05%	12,868,637.00
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	117,478,288.00	104,609,651.00	89.05%	12,868,637.00
-	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	43,683,689.00	43,540,538.00	99.67%	143,151.00
-	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	56,410,148.00	46,839,791.00	83.03%	9,570,357.00
-	Pengawasan Penanaman Modal	17,384,451.00	14,229,322.00	81.85%	3,155,129.00

**3. Hambatan Dan Kendala dalam Pencapaian Target Yang Telah
Ditetapkan**

a. Pendapatan

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan target pendapatan dari sektor retribusi PBG dan hanya diberikan dengan penetapan pendapatan sebesar RP. 500.000.000,00,- dan Pencapaian memenuhi target sebesar Rp



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025

236.942.100,00,- secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1) Perubahan Regulasi

Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang harus diikuti dengan perubahan peraturan daerah, dimana penetapan peraturan daerah membutuhkan proses yang panjang, sehingga dengan belum ditetapkannya peraturan daerah retribusi daerah tidak bisa dipungut.

2) Sumber – sumber pendapatan pengelolaanya kurang optimal

Terdapat beberapa sumber pendapatan yang diharapkan bisa memberikan pendapatan, pengelolaannya dilapangan kurang optimal. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga serta perangkat dan fasilitas yang tersedia kurang memadai lemahnya pengawasan serta kurangnya koordinasi dengan instansi teknis turut berpengaruh dalam proses pencapaian target pendapatan. Selain itu minimnya data juga berpengaruh dalam pencapaian target pendapatan.

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp. 2.883.924.209,00 atau 94.28% dari anggaran Rp: 3.058.745:377,00, tidak ada permasalahan karena kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN sesuai dengan yang dibutuhkan.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

Realisasi Fisik dan Keuangan pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 35.040.000,00 ataat 90.68% dari anggaran Rp.



38.640.000,00, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Realisasi Fisik dan Keuangan pada Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 17.386.718,00 atau 87.12% dari anggaran 19.956.776, realisasi tidak sampai 100% dikarenakan percetakan dan penjilidan di kurangi volume Dokumen selain itu tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan laporan akhir tahun.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya Realisasi fisik dan Keuangan sebesar Rp. 49.675.954 atau 92.24% dari anggaran Rp. 51.615.000,00 tidak ada masalah dalam pengadaan pakaian Dinas karena sesuai dengan jumlah seluruh pegawai.

- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Realisasi fisik dan keuangan sebesar Rp. 14.089.141,00 atau 57.65% dari anggaran Rp. 24.437.561,00 tidak bermasalah karena disesuaikan dengan jadwal bimtek dan jadwal workshop sesuai tugas pokok dan fungsi tapi Banyak kegiatan bimtek dan sosialisasi sudah menggunakan interaktif secara online(daring).

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pada kegiatan ini Realisasi fisik dan Keuangan sebesar Rp. 0 atau 00.00% dari anggaran Rp. 0, sub kegiatan ini tidak dilaksanakan karena surat kabar yang seharusnya di antar setiap hari oleh pihak Penyedia tetapi tidak ada pengantaran kendalanya kekurangan personil pengantar. Solusi untuk kegiatan ini mengganti pihak Penyedia Bahan Bacaan yang lebih profesional dalam penyediaan bahan bacaan.



- b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan Rp. 75.439.700,00 atau 94.97% dari anggaran Rp. 79.437.115,00, tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.

- 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - a. Pada Kegiatan ini Capaian realisasi Fisik dan realisasi keuangan RP. 80.183.500,00 atau 96.07% dari anggaran 83.459.996,00, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pada kegiatan ini Capaian realisasi fisik sebesar dan realisasi keuangan Rp. 39.525.533,00 atau 88.79% dari anggaran Rp. 44.513.760,00 ,tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Pada kegiatan ini Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan Rp. 89.000.000,00 atau 68.99% atau 68.99% dari anggaran Rp. 129.000.000, tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.

- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pada Sub Kegiatan ini Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.336.587,00 atau 78.94% dari anggaran Rp. 125.844.726, tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan



b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada Sub Kegiatan ini Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000 atau 100% dari Anggaran Rp. 5.000.000, tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

1. Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota

a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pada Sub Kegiatan ini Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.757.820,00 Atau 98.33% dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.024.814 ,tidak ada permasalahan dalam penyerapan anggaran dan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

III. Program Promosi Penanaman Modal

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Pada Sub kegiatan ini Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan sebesar Rp. 12.673.366 atau 95.77% dari anggaran sebesar Rp. 13.233.327, tidak ada permasalahan dalam penyerapan anggaran dan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

5. Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota



- a. Penyediaan pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sub. Kegiatan ini Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.798.382,- Atau 84.44% dari jumlah keuangan yang tersedia sebesar Rp. 25.815.432, tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.

- b. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Sub. Kegiatan ini Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan sebesar 87.745.500,- Atau 87.75% dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 100.000.000, tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan. Kegiatan ini menghasilkan output nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow. Pelaksanaan Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yaitu PT. Angkasa Global.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.540.538,- Atau 99.67% dari pagu anggaran sebesar Rp. 43.683.689, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yang tahun sebelumnya sub kegiatan ini di biayai melalui Dak dan Tahun 2025 menggunakan Dana Alokasi Umum.



b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Pada Sub Kegiatan ini Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.839.791,- Atau 83.03% dari pagu anggaran sebesar Rp. 56.410.148, tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan

c. Pengawasan Penanaman Modal

Pada Sub Kegiatan ini Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.229.322,- Atau 81.85% dari anggaran sebesar Rp. 17.384.451, tidak ada permasalahan tetapi penyerapan anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan capaian kinerja organisasi sebagaimana uraian pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91.95% atau 96.41% dari target 95 sehingga dapat dinyatakan **Sangat Berhasil**. Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 mencapai 92.32% dan realisasi anggaran pendapatan sebesar 100%.

Berbagai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan pada TA. 2025 ini merupakan hasil dari penyusunan yang telah melibatkan berbagai stakeholders. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pelaksanaannya tetap berada pada alur dan koridor perencanaan strategis dinas 2023 – 2026 sehingga semua kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2025 tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2023 - 2026.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berada dalam organisasi pemerintah kabupaten, maka program-program yang dilakukan tetap dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan diarahkan sebagai media dan sarana untuk mendukung Visi dan Misi serta Rencana Strategis Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berbagai upaya maksimal melalui program dinas yang dilakukan dimaknai sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara maksimal, khususnya di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan, program pemberdayaan manusia yang terdiri dari aparat pemerintah, swasta maupun masyarakat merupakan salah satu faktor



penggerak pembangunan yang harus dikembangkan dan diberdayakan.

2. Sebagai unit kerja yang bersifat pelayanan di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan, pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan program yang sangat penting untuk menghindari birokrasi perizinan yang panjang dan berbelit – belit.
3. Dilakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran dinas, sehingga semua pembiayaan kegiatan diupayakan tepat sasaran, dan tepat tujuan untuk kesejahteraan rakyat dan untuk keberlanjutan pembangunan.
4. Sebagai salah satu dinas yang diorientasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maka diupayakan dengan melakukan pembinaan kepegawaian agar senantiasa terbentuk aparatur dengan integritas yang tinggi.
5. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat telah dan akan dilakukan terus sebagai forum untuk sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
6. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan DAK nonfisik untuk fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kecamatan serta menampung dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat sektor penanaman modal.

B. SARAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mengusulkan kembali program kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan target tahunan dengan memperhatikan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan target RENSTRA 2023 s.d 2026.
2. Meningkatkan pemantauan pembinaan dan pengawasan melalui program kegiatan serta pendekatan sehingga diharapkan adanya



informasi timbal balik dari Pemerintah (DPMPTSP) khususnya terhadap program pusat dan daerah dengan pengusaha PMA/PMDN yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Bolaang Mongondow.

3. Mengkoordinasikan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Bappeda sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah tentang skala prioritas program kegiatan sesuai dengan Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu kepada tahapan pelaksanaan Renstra tahun 2023-2026.
4. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Meningkatkan Pelayanan, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap PMA/PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada.
7. Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama Bangunan gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik
9. Melakukan Penataan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensi.